***THE EFFECT OF TAXPAYER KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN SEMARANG***

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SEMARANG**

**Kurnia Mawaddah1, Andi Kartika2, Muhammad Ali Ma’sum3**

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

kurniamawaddah@mhs.unisbank.ac.id1, andikartika@edu.unisbank.ac.id2, ma’sum@edu.unisbank.ac.id3`

***ABSTRACT***

*Motor vehicle tax consists of annual tax and tax once every five years. Taxpayer compliance is the fulfillment of their tax obligations through tax regulations. This study was conducted to obtain information and analyze several causes of changes in taxpayer compliance in Semarang, such as taxpayer knowledge and consciousness, as well as tax sanctions. Research sampling technique with accidental sampling technique. The use of this type of data in the study is primary data. The population in the study includes taxpayers who own and control motor vehicles included in the list at SAMSAT Semarang 1 in 2022. The results of taxpayer knowledge testing showed that it did not have a significant reaction on taxpayer compliance. For the moment, taxpayer consciousness testing and tax sanctions show a significant influence on taxpayer compliance.*

***Keywords:*** *knowledge, consciousness, sanctions, compliance*

**ABSTRAK**

Pajak kendaraan bermotor terdiri dari pajak tahunan dan pajak lima tahun sekali. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui peraturan perpajakan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dan melakukan analisis beberapa penyebab perubahan kepatuhan wajib pajak di Semarang, seperti pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak. Teknik sampling penelitian dengan teknik *accidental sampling*. Penggunaan jenis data pada riset ini adalah data primer. Populasi yang ada di riset ini mencakup wajib pajak yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang termasuk dalam daftar di SAMSAT Semarang 1 pada tahun 2022. Hasil pengujian pengetahuan wajib pajak menunjukkan tidak berpengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Di lain sisi, pengujian kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** pengetahuan, kesadaran, sanksi, kepatuhan

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, di mana jumlah penduduk yang besar menyebabkan tingginya konsumsi masyarakat terutama pada kendaraan bermotor. Beban pajak kendaraan bermotor akan ditanggung oleh pemilik kendaraan dan akan semakin besar apabila pemilik kendaraan mempunyai lebih dari satu kendaraan. Pajak memegang peran penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki fungsi untuk membiayai segala pengeluaran termasuk pembangunan. Menurut Basuki & Jaeni (2022), masih banyak wajib pajak yang belum mengerti mengenai peraturan dan kegunaan pajak itu sendiri. Pajak adalah pembayaran dari rakyat kepada negara yang dilakukan menurut perundang-undangan dan pemungutannya dilakukan tanpa imbalan. Menurut Waluyo (2017), pajak merupakan bayaran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib melunasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak memperoleh hasil kembali yang langsung bisa memilih dan berfungsi untuk membayar pembiayaan pengeluaran umum negara untuk mengadakan pemerintahan. Wajib pajak memiliki peran meningkatkan jumlah penerimaan pajak dalam menjalankan kewajibannya (Wulandini & Srimindarti, 2023). Sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat berdasarkan badan pemungutan seperti wajib pajak yang terdiri dari berbagai pungutan yang salah satunya pajak daerah (Mardiasmo, 2018). Menurut Wulandari & Kartika (2021), dibutuhkan adanya pemungutan kepada subjek dan objek pajak daerah untuk memaksimalkan dan menambah pajak daerah untuk pendapatan dan belanja daerah. Pengorganisasian dan pengendalian pendapatan daerah diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri (Nawatmi *et al*, 2020).

Dua jenis pajak yang terdapat di Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikumpulkan dan diatur pemerintah pusat untuk kepentingan negara seperti PPN, PPB, PPnBM. Pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan dan diatur pemerintah daerah sesuai dengan aturan pemerintah pusat seperti pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, PKB, dan BBNKB. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di segala jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau alat lain, yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga penggerak bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki dua jenis yaitu pembayaran pajak setiap tahun dan lima tahun sekali. Pajak yang dibayarkan setiap lima tahun sekali merupakan pajak dengan penggantian plat nomor kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Penghapusan denda pajak yang dibebaskan kepada pemilik kendaraan merupakan suatu program pemerintah yang disebut pemutihan pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah penghapusan dana yang selama ini mengalami penunggakan pembayaran (Ferry & Sri, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang sudah dibebankan kepada wajib pajak. Ketaatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai keputusan undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak (Nugraheni & Srimindarti, 2022). Menurut Arta & Alfasadun (2022), bentuk kepatuhan wajib pajak adalah suatu pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya secara tegas akan diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.

Pengetahuan wajib pajak sendiri merupakan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Informasi yang digunakan wajib pajak untuk melakukan tindakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang pajak merupakan suatu bentuk pengetahuan wajib pajak (Fitria & Wahyudi, 2022). Menurut Prayitna & Witono (2022), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak akan terhalang apabila wajib pajak tidak mengetahui mengenai tata cara perpajakan yang berlaku (Nugroho & Sulistyawati, 2019). Penerimaan pajak negara dapat dipengaruhi oleh kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang disebabkan pengetahuan wajib pajak (Rizal, 2019). Menurut Qillaitta (2022), pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi apabila wajib pajak mengerti mengenai kegunaan, manfaat, aturan, tarif, norma, dan yang akan kembali untuk masyarakat. Hasil penelitian Amri & Syahfitri (2020) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rizal (2019), Karlina & Ethika (2020), Prayitna & Witono (2022), Qillaitta (2022), Milleani & Maryono (2020), Susanto & Arfamaini (2021) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak mengerti kewajiban seorang wajib pajak yang harus membayarkan pajaknya secara sukarela. Menurut Milleani & Maryono (2020), kesadaran wajib pajak merupakan suatu situasi di mana wajib pajak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam mengerti, mempercayai, menghargai, dan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk menambah kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan (Qillaitta, 2022). Amri & Syahfitri (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Rizal (2019), Karlina & Ethika (2020), Prayitna & Witono (2022), Qillaitta (2022), Milleani & Maryono (2020), Nurchafifah (2020), Susanto & Arfamaini (2021) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi merupakan tindakan memaksa seseorang untuk memenuhi peraturan. Sanksi pajak sendiri merupakan tindakan atau hukuman untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. Menurut Astiawan & Kartika (2022), sanksi perpajakan diartikan sebagai alat yang mencegah wajib pajak untuk menaati norma perpajakan. Sanksi berfungsi untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak terhadap kelalaian dan efek jera karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Rizal, 2019), Sanksi pajak merupakan alat untuk mengukur wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajak dan mengurangi kerugian yang disebabkan karena wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau keterlambatan dalam proses pembayaran pajak (Susanto & Arfamaini, 2021). Hasil penelitian Mustoffa *et al* (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Amri & Syahfitri (2020), Prayitna & Witono (2022), Nurchafifah (2020), Susanto & Arfamaini (2021) Nahari & Rosita (2022) sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak untuk memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2017). Menurut Susanto & Arfamaini (2021), kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi dari segi hukum maupun administrasi. Menurut Aswati *et al* (2018), dalam penerapan kepatuhan wajib pajak terdapat dua bentuk kepatuhan, meliputi kepatuhan formal yang merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan kepatuhan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

**Pengetahuan Wajib Pajak**

Pemahaman paling dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pengetahuan perpajakan (Congda, 2022). Menurut Resmi (2019), pengetahuan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui pemahaman mengenai hak dan kewajiban seorang wajib pajak (Dewi & Supadmi, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pada bidang perpajakan (Milleani & Maryono, 2020). Wajib pajak yang mengerti tentang pentingnya membayar pajak akan bersedia membayarkan pajaknya tanpa adanya paksaan, sehingga pengetahuan perpajakan dijadikan sebagai faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Qillaitta, 2022). Hak wajib pajak yang dimiliki setiap wajib pajak salah satunya adalah hak untuk memperoleh pelayanan dan kerahasiaan atas segala informasi yang berkaitan dengan wajib pajak dan hak untuk melakukan penundaan pembayaran. Sedangkan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor yaitu melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor dan membayarkan pajak kendaraan setiap tahun dan setiap lima tahun sekali. Pengetahuan wajib pajak dapat diartikan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban dalam memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak.

**Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi pajaknya dalam mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Milleani & Maryono, 2020). Menurut Aswati *et al* (2018), kesadaran wajib pajak dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditunjukan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkannya. Kesadaran wajib pajak terhadap fungsi pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang merupakan kewajiban warga negara (Rizkiani, 2022). Menurut Nurchafifah (2020), wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak tersebut memiliki kemauan untuk membayarkan pajaknya sesuai peraturan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan pembayaran pajak, hal ini karena mempunyai hubungan mengenai kemampuan dan kemauan seseorang.

**Sanksi Pajak**

Menurut Riskiani (2022), sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi. Sanksi perpajakan adalah alat untuk mengontrol wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban pajaknya dan mengurangi tingkat kerugian yang disebabkan wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya atau keterlambatan dalam pembayaran pajaknya (Susanto & Arfamaini, 2021). Sanksi berperan untuk memberikan hukuman positif atas kelalaian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk lebih patuh di masa pajak yang akan dating (Rizal,2019). Sanksi perpajakan terdapat dua jenis, yaitu sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan administrasi dan diberikan sanksi berupa denda, bunga, ataupun kenaikan, dan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan berupa penyembunyian, pemalsuan, dan tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana sendiri diberikan sebagai langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian mengenai kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, maka rumusan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

 

**METODE PENELITIAN**

**Pengumpulan Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer, di mana data diperoleh peneliti secara langsung dari beberapa responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data numeric atau data kualitatif yang dihitung (Sugiyono, 2019). Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Semarang 1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2019), a*ccidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara acak, di mana siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika orang yang kebetulan ditemui sesuai dengan sumber data. Penentuan jumlah sampel penelitian ini dengan rumus Slovin. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner yang disebarkan langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Semarang 1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan di mana responden diberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban (Sugiyono, 2019). Model pengukuran skala likert lima tingkat digunakan peneliti untuk mengukur pendapat yang diberikan responden, diantaranya Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**



Statistik deskriptif berfungsi untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan (Sugiyono, 2019). Hasil uji deskriptif diketahui bahwa terdapat 89 responden dengan total jawaban maximum 25 untuk pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan total maximum untuk kepatuhan wajib pajak sebesar 20. Total jawaban minimum 13 untuk pengetahuan wajib pajak, sedangkan total jawaban minimum untuk pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sebesar 14. Dengan rata-rata jawaban 89 responden menunjukkan 17,89 untuk kepatuhan wajib pajak, 21,56 untuk pengetahuan wajib pajak, sedangkan untuk kesadaran wajib pajak sebesar 22,16, dan sanksi pajak sebesar 21,04. Std. Deviation kepatuhan wajib pajak sebesar 2,080, untuk pengetahuan wajib pajak sebesar 2,680, sedangkan kesadaran wajib pajak sebesar 2,730, dan untuk sanksi pajak sebesar 3, 104. Dilihat dari hasil nilai Std. Deviation dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan sudah mewakili populasi penelitian, karena nilai Std. Deviation lebih kecil dari nilai rata-rata.



Uji validitas berfungsi untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung > r tabel, maka variabel tersebut dikatakan valid. Apabila r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak terhubung atau tidak valid. Berdasarkan tabel 2. Hasil uji validitas, diperoleh hasil bahwa nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan dan pernyataan pada kuesioner yang digunakan dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan valid.



Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan penelitian kempali kepada subjek yang sama. Data yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah metode *cronbach alpha*. Apabila nilai *cronbach alpha* > 0,06 maka instrument tersebut dikatakan reliable (Ghozali, 2018).

Berdasarkan tabel 3. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih besar dari 0,006, sehingga seluruh variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.



Menurut Sugiyono (2019), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov smirnov* untuk distribusi normal dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan tabel 4. Hasil uji normalitas nilai signifikansi pada hasil uji normalitas adalah sebesar 0,200. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal, karena nilai tersebut menunjukan hasil > 0,05.



Uji heteroskedastisitas digunakan sebagai pengujian terhadap suatu model regresi apakah memiliki ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Suatu model regresi dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05.

Berdasarkan tabel 5. Hasil uji heteroskedastisitas diperoleh hasil nilai signifikansi 0,168 untuk variabel pengetahuan pajak, nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar 0,035, dan variabel sanksi pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas hanya dalam variabel pengetahuan pajak.



Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji hubungan antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF, apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka variabel independen dikatakan bebas multikolinearitas.

Berdasarkan tabel 6. Hasil uji multikolinearitas diperoleh hasil nilai *tolerance* dan VIF pengetahuan wajib pajak sebesar 0,409 dan 2,447. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* dan VIF sebesar 0,435 dan 2,299, dan nilai *tolerance* dan VIF variabel sanksi pajak sebesar 0,778 dan 1,285. Nilai *tolerance* untuk setiap variabel menunjukkan > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.



Analisis regresi berfungsi untuk memprediksi pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat baik parsial maupun simultan (Ghozali, 2018). Regresi linier berganda digunakan untuk menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh antara variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama.

Berdasarkan tabel 7. Hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan :

Y = -0,091 + 0,161X1 + 0,288X2 + 0,378X3

Nilai konstanta sebesar – 0,091 berarti apabila pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,161, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,228, dan variabel sanksi pajak sebesar 0,378. Nilai koefisien regresi dari seluruh variabel menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel sanksi pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.



Pengambilan keputusan dengan uji F dilakukan dengan melihat nilai F hitung dan membandingkan nilai f tabel. Apabila nilai F hitung > nilai F tabel atau nilai F > 4, maka Ho ditolak atau dinyatakan bahwa semua variabel independen signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Berdasarkan tabel 8. Hasil uji F diketahui nilai F hitung sebesar 25,822 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai F tabel diperoleh sebesar 2,70 (3,100-3). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikan < 0,05.



Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi atau semakin mendekati satu, maka semakin baik hasil model regresi tersebut.

Berdasarkan tabel 9. Hasil uji koefisien fereminasi (R2) diketahui nilai R *square* sebesar 0,477 atau 47,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 47,7%. Sedangkan untuk 52,3% kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak tersedia dalam penelitian ini.

Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan uji t dilihat dari nilai t hitung > t tabel atau nilai signifikan < 0,05, maka Ho ditolak dan apabila t hitung < t tabel atau nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima.

Berdasarkan tabel 7. Hasil uji regresi linier berganda diperoleh hasil pengujian dari data penelitian bahwa : (1) Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,168 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, (2) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,035 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, (3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

**Pembahasan**

Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena nilai signifikan sebesar 0,168 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kurang mengetahui dan memahami mengenai fungsi dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak diartikan sebagai pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban dalam memberikan kontribusi kepada negara atau daerah melalui pembayaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Nahari & Rosita (2022) yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena nilai signifikan sebesar 0,035 < 0,05. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran wajib merupakan kondisi di mana wajib pajak mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban membayarkan pajaknya secara sukarela. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Rizal (2019), Karlina & Ethika (2020), Qillaitta (2022), Prayitna & Witono (2022), Milleani & Maryono (2020), Nurchafifah (2020), Susanto & Arfamaini (2021) yang menyatakan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak merupakan suatu pencegahan atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya tanpa toleransi. Sehingga semakin besar dan tegas dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Prayitna & Witono (2022), Nurchafifah (2020), Susanto & Arfamaini (2021), Nahari & Rosita (2022) yang menyatakan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan.

**PENUTUP**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan, (2) Pengaruh kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan, (3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan.

Keterbatasan penelitian ini sehubungan dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Semarang 1, dimana jawaban dari kuesioner tersebut tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya karena jawaban tersebut berasal dari persepsi responden.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas populasi wajib pajak kendaraan bermotor di Semarang, dan menambahkan variabel independen lain seperti sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan untuk hasil penelitian yang lebih maksimal. Untuk pihak SAMSAT diharapkan untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor mengenai pajak kendaraan bermotor dan pentingnya melaporkan dan membayarkan pajaknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amri , H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Accounting, Finance, and Auditing*.

Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.

Astiawan, B. P., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa PAsca Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Basuki, A., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*.

Congda, L. (2022). The Effect Of E-SAMSAT Implementation, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Tax Prayer Compliance In East Surabaya. *Krisnadwipayana International Journal Of Management Studies*.

Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayer. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research*.

Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*.

Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif .* Semarang: Yoga Pratama.

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*.

Kriyanto, R. (2017). *Teori Public Relation Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian Dan Praktik.* Jakarta: Kencana Preda Media Grub.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan.* Yogyakarta: ANDI.

Milleani, A., & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*.

Mustoffa, A. F., Ardiana, T. E., & Vebriana, A. E. (2022). Pengaruh SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

Nahari, F. N., & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*.

Nawatmi, S., Nusantara, A., & Santosa, A. B. (2020). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*.

Nuchafifah , I. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kabupaten Kendal.

Nugraheni, M. D., & Srimindiarti, C. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Selatan. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*.

Nugroho, A. H., & Sulistyawati, A. I. (2019). Taxpayer Compliance Determinants : An Empirical Study. *Jurnal Akuntansi*.

Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem SAMSAT Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *IKHRAITH-EKONOMIKA*.

Qillaitta, O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Rahayu, S. K. (2017). *PERPAJAKAN (Konsep, Sistem, Dan Implementasi.* Bandung: Rekayasa Sains.

Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*.

Rizkiani, N. (2022). The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, And Tax Penalties On Taxpayer Compliance At SAMSAT Bersama Office In The East Jakarta. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Literature*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B.* Bandung: ALFABETA.

Susanto, A. K., & Arfamaini, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi Sosial*.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen*.

Wulandini , D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Brangsong Kendal). *COSTING : Journal Of Economic, Business And Accounting*.